



General Overview

Entri FHNRW 16-31 Maret adalah 34 entri berita. Berita kesehatan dengan jumlah entri 12, antara lain perawat sering mengambil alih tugas dokter, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai membingungkan masyarakat yang hendak mengurus jaminan kesehatan. Berita pangan dan gizi berjumlah 9 entri, diantaranya 50 ha sawah di borong kering, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka saat ini tengah menunggu benih cadangan dari provinsi pasca ancaman kekeringan, IRT sulap lapangan bola jadi kebun sayur. Berita risiko dengan 11 entri, diantaranya membahas bencana banjir dan longsor yang merugikan warga. Berita tentang air yaitu Rp 20 M untuk air bersih di Jabar, dan distribusi air bersih dilakukan secara bergiliran.

Isu Terseleksi	1-15 Mar	16-31 Mar
Kesehatan (Health)	10	12
Pangan & Gizi (Food & Nutrition)	7	9
Risiko (Risk)	12	11
Air (Water)	9	2
Total	38	34

IRGSC NTT Research focus adalah publikasi regular yang berisikan ringkasan penelitian tentang NTT yang mutakhir yang dikombinasikan dengan berita dari tiga media harian utama di NTT yakni Pos Kupang, Timor Express dan Victory News. Fokus dari NTT Research Focus adalah pada isu kesehatan, pangan, nutrisi, risiko, dan air. Terkait rangkuman berita di bawah ini, diharapkan agar pembaca melakukan validasi dari kliping berita yang dimaksudkan [Lihat juga keterangan penerbitan di halaman 21].

Contents

HEALTH.....	3
1. PERAWAT SERING AMBILALIH TUGAS DOKTER	3
2. ANGGARAN MINIM, SULIT TEKAN KIA.....	3
3. FASILITAS KESEHATAN DAERAH PERBATASAN MINIM	4
4. BPJS PERSULIT MASYARAKAT MISKIN.....	4
5. PASIEN PENYAKIT JIWA TERUS BERTAMBAH.....	5
6. KONSUMSI OBAT TB BAYI DERI KIAN PARAH.....	6
7. BANYAK KELUARGA PASIEN BELUM SADAR	6
8. NTT KEBAGIAN RP 182,6 M PAJAK ROKOK	7
9. BANGUN KERJA SAMA TEKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANAK.....	7
10. TIDAK PROAKTIF, POLISI GELEDAH DINKES.....	8
11. SATU MCK UNTUK 25 KELUARGA	9
12. RSUD JOHANNES PESAN OBAT DARI LUAR	9
FOOD & NUTRITION	10
1. 50 HA SAWAH DI BORONG KERING	10
2. MALAKA TUNGGU BENIH CADANGAN.....	10
3. IRT SULAP LAPANGAN BOLA JADI KEBUN SAYUR	11
4. BASMI HAMA DENGAN TEMBAKAU	11
5. PEMERINTAH HANYA GEMAR JANJI.....	12
6. NELAYAN PRODUKSI RUMPUT LAUT GULUNG TIKAR.....	13
7. MASYARAKAT TTU KECEWA TAK DAPAT BENIH JAGUNG.....	13
8. HARGA BERAS MERANGKAK NAIK	14
9. TANAM JAGUNG MENJANJIKAN	14
RISK 15	
1. RUMAH AMBROS TERTIMBUN LONGSOR.....	15
2. PANTAI JADI TEMPAT SAMPAH.....	15
3. JALAN PERBATASAN DIKERJAKAN ASAL JADI.....	16
4. LONGSOR, TRANSPORTASI LUMPUH 15 JAM	16
5. ENAM KALI GOTONG-ROYONG, LIMA KALI TERBAWA BANJIR	17
6. KAPAL CARGO TERSANGKUT DI UJUNG LANDASAN PACU BANDARA.....	18
7. IRIGASI WAE DINGIN DAN WAE DANGI MUBAZIR.....	18
8. CUACA BURUK PELAYARAN KUPANG-ROTE LUMPUH.....	18
9. BANJIR HANCURKAN BENDUNGAN OEHANI	19
10. DUA RUMAH AMBRUK TERTIMPA LONGSOR	19
11. JALAN SUMBU KUANFATU-KELE NYARIS PUTUS	20
WATER.....	20
1. RP 20 M UNTUK AIR BERSIH DI MABAR.....	20

HEALTH

1. PERAWAT SERING AMBILALIH TUGAS DOKTER

Pos Kupang: Minggu, 23 Maret 2014 (halaman 5)

Wakil Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, SH.,MH, mengingatkan perawat yang bertugas di Manggarai untuk selalu memegang teguh kode etik keperawatan selama menjalankan tugasnya. “Masih banyak puskesmas yang tak ada dokternya, maka pekerjaan yang seharusnya dijalankan oleh dokter juga dilakukan perawat. Kalau perawat tidak ambil tindakan akan disalahkan oleh pasien dan keluarganya. Tetapi juga kalau tindakan yang ditempuh itu ternyata berakibat merugikan maka perawat akan berurusan dengan ancaman hukum pidana dan perdata,” kata Kamelus. Dalam dialog, para perawat mengungkapkan berbagai situasi pelayanan yang seringkali dihadapi. Ketiadaan dokter anastesi di RSUD Ruteng, ungkap perawat, perawat terpaksa menjalankan tugas anastesi. “Dalam situasi darurat, perawat melakukan bius kepada pasien yang harus dioperasi. Kalau tidak ditempuh bisa fatal kepada pasien itu. saya sarankan supaya pengalaman-pengalaman seperti ini dicatat, dibukukan, dan disampaikan kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) atau Kemenkes supaya dibuat dengan regulasi melindungi profesi ini,” kata Kamelus.

2. ANGGARAN MINIM, SULIT TEKAN KIA

Timor Express: Kamis, 20 Maret 2014 (halaman 9)

Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di NTT, dinilai belum memprioritaskan anggaran untuk kesehatan, yakni sebesar 10 persen pada setiap tingkatan pemerintahan. Saat ini pemerintah baru mengalokasikan dua atau tiga persen dari APBN dan APBD kabupaten/kota. Dengan kondisi saat ini, kapan rakyat dapat meningkatkan derajat kesehatan, terutama ibu dan anak. “Pemerintah harus naikkan alokasi anggaran untuk kesehatan,” ungkap Ah Maftuchan, Social Policy and Governance Specialist, Perkumpulan Prakarsa, dalam sambutannya ketika membuka workshop bertajuk Sharing Pengalaman dalam Menekan Angka Kematian Ibu dan Anak di T-More Hotel, Rabu (19/3). Dikatakan, dengan peningkatan anggaran kesehatan, tentunya akan berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama menekan angka kematian ibu dan anak (KIA), sebagaimana target MDGs 2015. APBN khusus untuk kesehatan sebesar 2,39 persen dari total APBN 1.229 triliun pada tahun 2011. Tahun 2012 naik menjadi 2,5 persen dari APBN sebanyak Rp 1400 triliun, tahun 2013 turun

menjadi 2,3 persen dari APBN sebanyak Rp 1.600 triliun. Pada tahun 2014 anggaran untuk KIA sebesar Rp 2,4 triliun. Karena itu, anggota DPRD, Fary Francis, meminta ada inisiatif baru agar dalam perubahan APBN Mei mendatang bisa ditambah.

3. FASILITAS KESEHATAN DAERAH PERBATASAN MINIM

Victory News: Jumat, 28 Maret 2014 (halaman 15)

Lemahnya koordinasi antar pemerintah kabupaten menimbulkan minimnya fasilitas kesehatan pada daerah-daerah perbatasan antar kabupaten. Akibatnya, masyarakat di daerah perbatasan kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Demikian penjelasan peneliti Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) NTT Elcid Li kepada VN, Kamis (27/3). Elcid menjelaskan, hasil penelitiannya menunjukkan beberapa puskesmas di daerah perbatasan antar kabupaten sangat minim sebagai akibat koordinasi yang dilakukan oleh para Bupati dan Walikota masih lemah. Koordinasi antar kabupaten tak boleh dipandang sebelah mata. Karena, masyarakat perbatasan juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah. "Kalau koordinasi lintas kabupaten itu buruk, pasti yang akan diperhatikan dengan baik yaitu daerah yang dekat dengan ibukota kabupaten dan kecamatan. Harus diingat bahwa masih ada titik-titik rawan yaitu pada daerah perbatasan," tegas Elcid. Ia berharap, bupati dan walikota yang memiliki masyarakat secara riil dapat mengubah pola pikir dan mengesampingkan aspek-aspek lain demi kepentingan masyarakat luas. Apalagi, kehadiran para pemimpin tersebut bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Senada dengan Elcid, Ketua Liga Mahasiswa NasDem NTT Yuven Tukung menambahkan, perhatian pemerintah kepada masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan masih sangat minim. Hingga saat ini belum seluruh puskesmas di NTT memiliki dokter, terutama puskesmas yang ada di daerah terpencil. Yuven berharap, para kepala daerah dapat membangun koordinasi secara cerdas dan bermartabat demi kepentingan masyarakat.

4. BPJS PERSULIT MASYARAKAT MISKIN

Victory News: Kamis, 20 Maret 2014 (halaman 13)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai membingungkan masyarakat yang hendak mengurus jaminan kesehatan. Proses pengurusan untuk menjadi anggota pun dirasakan berbelit dan menyulitkan. Alosius Bala Junior, warga Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata kepada VN, Rabu (19/3) mengatakan, lemahnya sosialisasi dari pihak BPJS terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah, menjadi faktor penyebab banyak tidak mengetahui perubahan program dari Jamkesmas ke BPJS. Menurutnya, bahwa dalam program Jamkesmas sebelumnya, dikatakan akan berlaku seumur hidup. namun dalam perjalanan, program Jamkesmas

ini diganti dengan program BPJS yang berlaku secara nasional. Hal ini membingungkan masyarakat yang pemahamannya rendah. “Pertanyaan apakah setelah mengurus BPJS ini, ada keluasaan bagi masyarakat miskin untuk melakukan pengobatan secara gratis. Hal-hal ini justru membingungkan masyarakat menengah ke bawah dalam penggunaan BPJS tersebut,” kata Aloisius. Dia menilai, BPJS merupakan kapitalisasi kesehatan yang mana sudah diserahkan kepada pihak ketiga untuk mengelolanya. Hal ini justru mencerminkan negara melepaskan tanggung jawab terhadap jaminan kesehatan bagi masyarakat. Tidak heran kalau setiap pergantian rezim, pasti perubahan program pun terus berubah. “Bagaimana mungkin, bagi pengguna BPJS, harus tiap bulannya dibebankan iuran Rp 25 ribu untuk masyarakat miskin. Sedangkan proses untuk mengurus BPJS ini, juga terkesan sangat sulit. Sehingga banyak masyarakat yang pasif untuk mengurus BPJS. Masih lebih baik kita gunakan Jamkesmas untuk berobat,” ujar Aloisius. Kepala Operasional BPJS Kabupaten Lembata Novita Nale kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (14/3) mengatakan, pelaksanaan BPJS di Kabupaten Lembata, mulai dilakukan sejak 1 Januari 2014 lalu. Ia menjelaskan, yang sudah mendaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, mencapai 200-an jiwa secara keseluruhan untuk Kabupaten Lembata. Ia mengatakan, untuk mendapat pelayanan kesehatan nasional ini, dibuka seluas-luasnya tidak hanya kepada masyarakat. Namun juga berlaku bagi PNS, TNI, Polri, Badan Usaha dan peserta mandiri. “Penggunaan BPJS atau JKN ini, tetap dikenakan iuran per bulan bagi keluarga yang memiliki dua anak. Sementara anak yang ketiga ditanggung oleh Pemerintah. Untuk Jamkesmas, iurannya dari APBN. Untuk Kabupaten Lembata, 4.600 jiwa yang sudah tercover oleh Pemkab Lembata. Semuanya disebutkan sebagai peserta JKN. Kalau Badan Usaha ditanggung perusahaan dari PPTK. Perusahaan tanggung empat persen. Sedangkan karyawan menanggung 0,5 persen,” ujar Novita. Ia mengatakan, data pengguna BPJS bagi PNS diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota. Ia mengakui, pihaknya baru berjalan tiga bulan dalam pelaksanaan BPJS di Kabupaten Lembata sehingga belum semua masyarakat yang mendapatkan kartu BPJS. “Pemerintah daerah punya tugas mengcover masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Yang baru tercover 60.213 jiwa untuk pengguna Jamkesmas yang kami terima,” untkap Novita.

5. PASIEN PENYAKIT JIWA TERUS BERTAMBAH

Victory News: Selasa, 18 Maret 2014 (halaman 15)

Walau jumlah pasien sakit jiwa terus bertambah dari tahun ke tahun, namun hingga kini NTT belum memiliki rumah sakit jiwa. Gedung RSJ yang telah dibangun di Naimata juga belum dapat difungsikan. Demikian dikatakan dokter spesialis penyakit jiwa RSUD WZ Johannes dr Shinta Windari kepada VN, Senin (17/3). Menurut Shinta, saat ini empat orang pasien sakit jiwa sedang dalam perawatan di RSUD WZ Johannes. Satu diantaranya adalah pasien yang membayarkan. Penanganan pasien sakit jiwa, jelasnya, dilakukan dengan psikoterapi, terapi obat, dan terapi mendengarkan musik, serta

olahraga. Ruang kejiwaan di rumah sakit sangat terbatas. Kapasitas bangsal hanya bisa menampung 13 orang penderita. Sementara ruang isolasi terdapat tiga ruangan. “Dua ruangan bangsal mengalami kerusakan, dan sejauh ini belum ada perbaikan. Untung saja pasien berbahaya baru satu, sehingga bisa ditangani,” katanya. Dia berharap, manajemen rumah sakit segera memperbaiki ruangan yang rusak.

6. KONSUMSI OBAT TB BAYI DERI KIAN PARAH

Victory News: Senin, 17 Maret 2014 (halaman 15)

Deri Abi, bayi berusia tiga tahun asal Kelurahan Sasi, Kabupaten TTU yang semula divonis dokter RSUD Kefamenanu yang merawatnya menderita tuberculosis (TB) dan diberi obat TB tak kunjung sembuh. Malah, setelah mengkonsumsi obat yang diberikan, kondisinya kian parah dan harus dilarikan ke RS Bhayangkara Kupang. Charles, salah satu keluarga bayi Deri kepada VN di RS Bhayangkara, Minggu (16/3) mengatakan, semenjak menderita sesak nafas dan batuk-batuk pada tiga minggu lalu, bayi Deri dibawa berobat ke RSUD Kefamenanu. Hasil diagnosa dokter menerangkan bahwa ia menderita penyakit TB. Dokter bilang dia kena penyakit TB. “Dokter memberi obat TB dengan anjuran tiap hari minum empat butir selama enam bulan. Namun, setelah satu minggu obat diminum, kondisi pasien memburuk. Berat badannya menurun dan membengkak. Ayahnya menghentikan penggunaan obat,” jelasnya. Melihat kondisi anaknya memburuk, kata Charles, ayah pasien memilih berobat ke Kupang. Saat berobat ke Kupang dan diperiksa dokter, ternyata Deri didiagnosa ada cairan yang menempel dalam hati dan harus segera dioperasi. Namun, pihak rumah sakit mengatakan, jika sampai dioperasi, dua kemungkinan bisa terjadi. Kemungkinan pertama, pasien bisa sembuh dan kemungkinan kedua, pasien bisa meninggal saat operasi karena kondisi fisiknya melemah. Namun karena tawaran operasi dengan dua kemungkinan itu, ayah bayi Deri memutuskan untuk kembali ke kampung dan berobat menggunakan obat kampung.

7. BANYAK KELUARGA PASIEN BELUM SADAR

Timor Express: Senin, 17 Maret 2014 (halaman 11)

Banyak keluarga pasien menggunakan emperan rumah sakit, sebagai tempat menyimpan barang bawaan, juga sebagai tempat tidur, kala menjaga keluarga yang sakit. Kondisi ini, jelas membuat pemandangan yang tidak bagus dan kumuh serta mengganggu pelayanan rumah sakit. Wakil Direktur Keuangan dan Umum RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang, Ari Ondok mengatakan “Kami sudah himbau bahkan larang keluarga yang menjaga pasien di bangsal, termasuk tidak tidur di emperan bangsal.” Disebutkan, semua ini terjadi karena mental masyarakat, yang tidak mau peduli, tidak mau mengerti atau tidak mau paham tentang pentingnya menjaga ketertiban dan kebersihan rumah sakit. Masyarakat tambahnya, belum sadar akan pentingnya menjaga

ketenangan demi perawatan para pasien. “Kita akan batasi dan tertibkan jika keluarga pasien banyak, dan jadikan emperan bangsal rumah sakit, sebagai tempat tidur,” tambahnya.

8. NTT KEBAGIAN RP 182,6 M PAJAK ROKOK

Victory News: Sabtu, 22 Maret 2014 (halaman 9)

Tahun 2014 NTT mendapat dana perimbangan pajak rokok sebesar Rp 182,6 miliar, padahal pengelolaan pajak rokok baru dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT sejak 1 Januari 2014. Dana ini 50 persennya dikembalikan untuk pembiayaan sektor kesehatan, terutama dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Demikian dikatakan Sekda NTT Frans Salem kepada VN, Jumat (21/3) usai pembukaan Kegiatan Sosialisasi Pajak Rokok Tahun 2014 di Hotel Ima Kupang. Dia mengatakan, pajak ini bukan dipungut dan diserahkan ke kementerian kemudian akan diserahkan ke pemerintah. “Pemprov NTT berkewajiban melakukan pemantauan terhadap pemungutan pajak sehingga mencegah oknum yang memungut pajak secara liar karena tidak masuk dalam bea cukai,” ungkapnya. Dia menambahkan, fokus pemanfaatan pajak tersebut kepada kesehatan karena dampak pembelian rokok langsung terhadap kesehatan. Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTT Obaldus Toda mengatakan, otoritas pengelolaan pajak rokok diberikan kepada pemerintah daerah terkait dengan penerimaan bagi hasil dana perimbangan yang termasuk didalamnya adalah pajak rokok. Dia menjelaskan, di NTT, penerimaan pajak rokok dibagi 30 persen untuk Provinsi dan 70 persennya untuk kabupaten/kota. “Tahun 2014 NTT mendapat dana perimbangan pajak rokok sebesar Rp 182,6 miliar. Dana ini diperuntukkan bagi pelayanan risiko bahaya rokok terutama pada rumah sakit, dinas kesehatan, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan agar dilakukan tata kelola secara baik produksi tembakau,” jelasnya. Pemanfaatan dana tersebut, menurut Toda selain untuk pembenahan infrastruktur pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, juga difokuskan untuk upaya sosialisasi penyadaran risiko bahaya merokok kepada generasi muda. Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinkes NTT Joyce Tibuludji mengatakan, realisasi pajak rokok selain diperuntukkan bagi pembiayaan kesehatan dalam membantu pembiayaan BPJS di rumah sakit, harus ada peruntukan bagi aksi sosialisasi dan memasyarakatkan bahaya rokok serta kampanye melalui iklan layanan masyarakat. Di samping itu, harus ada pembentukan kawasan bebas rokok serta ruang khusus bagi para perokok. “Khusus di NTT, Kabupaten Flotim telah ada perda sehingga dilaksanakan pajak rokok daerah (PRD), sementara untuk Kota Kupang, telah diberlakukan PRD namun belum ada perda yang mengatur tentang lokasi merokok tersebut,” tandasnya.

9. BANGUN KERJA SAMA TEKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANAK

Victory News: Kamis, 27 Maret 2014 (halaman 15)

Upaya untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian anak (AKA) tidak akan berhasil jika pemprov dan pemerintah kabupaten/kota tidak bersinergi secara baik. Program Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT tidak akan berhasil jika tidak diikuti komitmen dari bupati dan walikota se-NTT. Peneliti Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) NTT Elcid Li kepada VN, Rabu (26/3) mengatakan, jika sinergitas itu telah terbangun secara baik, maka implementasinya dapat terlihat dari dukungan anggaran yang diberikan untuk menekan AKI dan AKA melalui program yang digagas pemprov NTT. Solusi yang patut dipertimbangkan pemprov menanggapi kondisi dimaksud, kata Elcid, yaitu Pemprov NTT melalui Dinas Kesehatan Provinsi NTT harus menjadikan beberapa kabupaten yang jumlah AKI dan AKA-nya tinggi menjadi kabupaten percontohan pelaksanaan program tersebut, sehingga hasil dari kabupaten percontohan pelaksanaan program Revolusi KIA pada kabupaten/kota lainnya. Menurutnya, yang tidak kalah penting dalam upaya menekan AKI dan AKA yaitu ketersediaan fasilitas kesehatan, pola hidup, dan pembaruan budaya. Ketiga hal tersebut merupakan faktor penting dalam upaya untuk menekan AKA dan AKI di NTT. “Tidak sebatas dukungan anggaran saja,” tegas Elcid. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan NTT dr Mindo Sinaga mengatakan, grafik angka kematian ibu di NTT saat ini mengalami penurunan. Sedangkan, kematian bayi tidak tetap. Kadang mengalami peningkatan dan penurunan. “Kematian bayi itu sifatnya fluktuatif,” kata Mindo. Ia menjelaskan, untuk mengatasi kondisi tersebut, pihaknya telah menjalankan Program Revolusi KIA. Namun, pihaknya menemukan beberapa kendala, diantaranya minimnya dukungan anggaran pemerintah kabupaten/kota, budaya masyarakat, dan kesadaran masyarakat yang masih jauh dari harapan.

10. TIDAK PROAKTIF, POLISI GELEDAH DINKES

Timor Express: Selasa, 25 Maret 2014 (halaman 13)

Akibat tidak pernah proaktif pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) TTS memberikan dokumen yang dibutuhkan penyidik Polres TTS terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana pemeliharaan mobil Dinkes dan dana operasional mobil puskesmas keliling (pusling) tahun anggaran 2010 dan 2011, Senin (24/3) aparat kepolisian Polres TTS melakukan penggeledahan di dua ruang keuangan Dinkes TTS. Penggeledahan dilakukan untuk menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan kasus tersebut, sekira pukul 11.00 Wita. Kapolres TTS, AKBP Agus Hermawan melalui Kasatreskrim, Iptu Donny Dunggio mengatakan, “Kami panggil Kasubag Keuangan Dinkes TTS tiga kali, tapi waktu hadir tidak bawa dokumen dengan berbagai alasan. Sehingga kami melakukan upaya penyitaan secara paksa”. Donny menjelaskan, sesuai hasil BPKP, diindikasikan telah terjadi kerugian negara senilai 64 juta lebih pada penggunaan dana operasional mobil pusling dan dana pemeliharaan kendaraan Dinkes TTS.

11. SATU MCK UNTUK 25 KELUARGA

Pos Kupang: Kamis, 27 Maret 2014 (halaman 18)

Perumahan baru bagi ratusan keluarga pengungsi Gunung Rokatenda, Palue, Sikka dibangun cukup rapat. Masyarakat kemudian menghadapi persoalan bagaimana membangun fasilitas MCK (mandi, cuci dan kakus) di pemukiman itu. Untuk jangka pendek, masyarakat pengungsi menikmati fasilitas MCK sumbangan Caritas Keuskupan Maumere. Satu MCK paling kurang dimanfaatkan oleh 25 KK. “Empat blok ini menggunakan satu WC. Satu profil tank untuk 20 keluarga. Kita kesulitan komunikasi, ketika habis air, kita kontak, dua tiga hari baru datang lagi. Kita juga dipungut biaya oleh panitia air,” tandas Genisius, salah satu warga pengungsi. Panitia air adalah warga pengungsi yang lebih awal tiba di Hewuli. Ketika profil tank diisi, per KK dipungut Rp 5.000. Namun Genisius sendiri enggan menjelaskan panitia air yang memungut uang Rp 5000 per KK itu. Dijelaskannya, warga yang belum merampungkan pembangunan rumah menginap di rumah para tetangga. “Ada yang tidur gabung di rumah tetangga. Tidur di lantai tanah, tanpa kelambu dan penuh nyamuk,” tandas Genisius. Petrus Lule, warga lainnya mengungkapkan, mereka masih kesulitan air bersih. Meski ada MCK, tapi karena tidak ada air, maka warga masih BAB di kebun warga sekitar.

12. RSUD JOHANNES PESAN OBAT DARI LUAR

Pos Kupang: Selasa, 25 Maret 2014 (halaman 15)

Masih ada beberapa jenis obat yang tidak memiliki stok di instalasi farmasi RSUD Prof.Dr. WZ Johannes, Kupang. Untuk melayani pasien, membutuhkan waktu karena harus dipesan dari luar instalasi farmasi. Demikian Kepala Instalasi Farmasi RSUD WZ Johannes Nelci Ndun, S.Farm, A.Pt, yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/3). “Sekarang ini semuanya tercover dalam JKN yakni peserta jamsostek, akses sosial dan jamkesmas. Semuanya tercover dalam sistem klaim paket Indonesia Case Based Groups (INACBGs). Saya tidak bisa pungkiri kalau ada beberapa jenis obat yang tidak ada. Kita melakukan pengadaan obat berdasarkan pedoman formularium nasional. Namun karena formularium ini baru sehingga ada beberapa obat yang tidak ada,” ujarnya. “Misalnya untuk natamisin, obat untuk tetes mata dan juga beberapa jenis obat kanker. Kita tidak bisa menjamin 100 persen kalau obat itu tersedia karena ada banyak hal yang mempengaruhinya. Tetapi kadang pasien tidak mau tahu karena mereka beranggapan bahwa obat harus selalu tersedia di apotik,” tambahnya. Menurut Nelci, membutuhkan waktu sehingga kalau obat itu tidak ada di instalasi farmasi namun masuk dalam formularium, mereka akan berupaya untuk mencari obat tersebut. Misalnya dengan menghubungi apotik pelengkap karena berada di dalam lokasi rumah sakit dan sudah ada kerjasama dengan instalasi farmasi. Kesulitannya, kata Nelci, kadang di Perusahaan Besar Farmasi (PBF) juga kosong sehingga harus dipesan dari Denpasar-Bali.

Menurutnya, kadang pasien membeli obat langsung di apotik luar dan hal seperti ini sulit dikontrol karena itu semua proses harus melalui instalasi farmasi. “Kalau ada obat yang tidak masuk di dalam formularium maka kami akan menghubungi dokter yang memberikan resep tersebut untuk menggantinya dengan obat komposisi dan dosis yang sama tetapi termasuk di dalam formularium,” jelasnya.

FOOD & NUTRITION

1. 50 HA SAWAH DI BORONG KERING

Timor Express: Senin, 17 Maret 2014 (halaman 15)

Dua hari terakhir, Rabu (12/3) dan Kamis (13/3) wilayah Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur (Matim) tiba-tiba diguyur hujan lebat. Guyuran hujan itu tidak membawa dampak positif **terhadap** ratusan hektare tanaman padi milik petani di areal persawahan Wae Reca dan Toka Desa Nanga Labang Kecamatan Borong, yang mati akibat kekeringan selama ini. Hujan tiba, tanaman petani tetap kering dan mati. Demikian dikatakan petani asal Desa Nanga Labang, Bene Dami dan Aris Bumi. Tanaman padi yang kering dan gagal tumbuh hingga gagal panen, tiga minggu hingga dua bulan. Hal ini karena lahan sawah kering, tidak dapat dialiri air. Selain itu hujan tidak turun sejak Desember 2013. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Matim, Donatus Datur, petani sudah mengalami kerugian hingga mencapai jutaan rupiah, jika dihitung sejak proses lahan bajak, biaya perawatan dengan membeli pupuk dan obat-obatan. Datur mengatakan, saat ini pemerintah telah membuat laporan sekaligus proposal kepada Kementerian Pertanian terkait gagal panen, dengan tujuan meminta benih untuk masyarakat. Ia berharap, Kementerian Pertanian bisa menjawab dan segera membantu petani di Matim yang mengalami bencana gagal panen.

2. MALAKA TUNGGU BENIH CADANGAN

Pos Kupang: Rabu, 19 Maret 2014 (halaman 12)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka saat ini tengah menunggu benih cadangan dari provinsi pasca ancaman kekeringan. Pemda setempat telah menyiapkan lahan dan diharapkan dalam waktu dekat benih sudah tiba untuk musim tanam kedua memanfaatkan sisa hujan yang ada. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malaka, Ir. Petrus Bria, Senin (17/3). Petrus Bria mengakui, stok benih yang ada di Kabupaten Malaka pada tahun 2014 ini sudah ada seperti jagung 9 ton, padi sawah seluas 300 hektar (9 ton), padi ladang seluas 200 hektar (6 ton) dan kacang hijau 2,5 ton. Namun, stok ini dirasakan masih kurang sehingga masih menunggu stok dari provinsi setelah beberapa waktu lalu diajukan

proposalnya. Petrus menyebut luas baku lahan di Kabupaten Malaka yakni lahan sawah seluas 23.191 hektar dan lahan kering seluas 191.027 hektar. Khusus untuk lahan sawah dapat dirincikan, irigasi teknis seluas 12.299 hektar, irigasi semi teknis seluas 1553 hektar, lahan tadah hujan seluas 9339 hektar dan lahan sawah yang menggunakan pompa air seluas 15 hektar. “Kabupaten Malaka juga termasuk salah satu dari 8 kabupaten di NTT yang terancam kekeringan. Oleh karena itu kami mengharapkan agar pendropingan benih segera dilakukan provinsi secepatnya karena laporan dan data sudah dimasukkan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT serta Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan NTT,” ujar Bria.

3. IRT SULAP LAPANGAN BOLA JADI KEBUN SAYUR

Pos Kupang: Rabu, 19 Maret 2014 (halaman 13)

Delapan belas orang ibu rumah tangga (IRT) yang tergabung dalam Kelompok Tani Woka di Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Sumba Timur, menyulap lapangan sepakbola seluas satu hektar menjadi kebun sayur organik. Jenis-jenis sayuran yang dibudidayakan, antara lain petcay, sawi kaliand dan kol. Kepada Pos Kupang, Senin (17/3), seorang anggota Kelompok Tani Woka, Elisabeth Hada Rendi (59) menjelaskan, pada musim hujan para petani di daerah itu enggan membudidayakan tanaman palawija. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan menganalisa kondisi cuaca yang mengakibatkan munculnya serangan hama dan penyakit. “Alasan inilah yang membuat kami menyulap sebuah lahan tidur seluas kurang lebih satu hektar menjadi kebun sayuran organik. Lokasi ini sebelumnya dipakai anak-anak untuk main bola. Sekarang kami kelompok wanita mengolahnya menjadi kebun sayuran organik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,” jelas Elisabeth. Hal senada dikatakan Ketua Kelompok Tani Woka, Margareta Radja (41). Dia mengatakan, selama ini para petani jarang dan bahkan enggan membudidayakan palawija di musim hujan. Peralnya, minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh para petani dalam menganalisa iklim menjadi faktor penyebab munculnya serangan hama dan penyakit. “Kami dibimbing oleh IPPHTI (Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia) bekerja sama dengan Radio Max FM Waingapu,” jelasnya. Infrastruktur, diakui Margareta, didatangkan dari Bandung, melatih para petani untuk mandiri. Para anggota kelompok tani wanita dilatih membuat pupuk kompos dari kotoran ternak sebagai pupuk dasar. Selain itu untuk menyuburkan tanaman, para petani memanfaatkan limbah biogas yang telah difermentasi menjadi pupuk cair organik. “Jadi, kita tidak membeli pupuk kimia buatan pabrik tapi produksi sendiri dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar,” tandas Margareta.

4. BASMI HAMA DENGAN TEMBAKAU

Pos Kupang: Rabu, 19 Maret 2014 (halaman 13)

Serangan hama dan penyakit terhadap tanaman palawija pada musim hujan merupakan salah satu faktor penghambat pertumbuhan roda ekonomi rumah tangga para petani. Pasalnya, setiap kali musim hujan, para petani enggan menanam dan membudidayakan sayuran. Padahal jika dibandingkan musim panas, jauh lebih mudah menanam sayuran pada musim hujan. “Rata-rata para petani di Sumba, lebih khusus Sumba Timur, biasanya kalau tanam sayur pasti diserang hama dan penyakit. Padahal hama dan penyakit bisa dikendalikan dengan membaca iklim dan penanggulangannya menggunakan PHT (Pengendalian Hama Terpadu),” ujar Rahmat, instruktur pertanian dari IPPHTI (Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia) kepada Pos Kupang, Senin (17/3). Hama dan penyakit pada sayuran, lanjutnya, ditanggulangi atau dikendalikan dengan ramuan pestisida nabati. Untuk memproduksi pestisida nabati memanfaatkan bahan-bahan dasar yang diambil dari tumbuhan. Jenis-jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi pestisida nabati, antara lain tembakau, daun nimba, brotowali, akar ruba dan ubi gadung racun (*iwi*).” Ini akan menghasilkan racun kontak dan sistemik yang ramah terhadap lingkungan,” jelas Rahmat. Sementara zat pengatur atau perangsang tumbuh (ZPT), petani dilatih untuk memproduksi pupuk organik cair dari limbah kotoran ternak. “Kita harapkan ini menjadi contoh bagi petani yang lain,” tandasnya.

5. PEMERINTAH HANYA GEMAR JANJI

Pos Kupang: Jumat, 21 Maret 2014 (halaman 12)

Lahan pertanian seluas 21 hektar yang dibuka oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) TTU menggunakan dana bantuan sosial (Bansos) tahun 2012 di Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, sampai saat ini mubazir, tidak bisa ditanami. Masyarakat dijanjikan untuk mendapatkan bantuan bibit padi dan jagung, namun tidak ditepati pemerintah. Sebelumnya, sebagian lahan sudah diolah oleh masyarakat setempat untuk ditanami padi. Namun setelah digusur oleh pemerintah, saluran irigasi sepanjang 300 meter yang harus dibangun sekaligus dengan penggusuran lahan tersebut tidak dilakukan. Selain itu, pematang sawah juga tidak dibentuk sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), hanya dibuat gundukan seadanya pada batas-batas tanah masyarakat. sejumlah warga pemilik lahan yang ditemui Pos Kupang Rabu (19/3), diantaranya Goris Lopis, Petrus Barbosa, Yoseph Fallo, dan Anton Fallo, mengaku kecewa atas sikap pemerintah yang hanya gemar memberikan janji-janji manis kepada masyarakat. Namun kemudian tidak pernah ditepati. “Kami jelas sangat kecewa dengan kondisi yang ada saat ini. sebab sebelum digusur tahun 2012, kami masih mengolah lahan tersebut untuk ditanami padi. Namun setelah digusur, tidak dibuatkan pematang dan juga saluran irigasi sepanjang 300 meter sehingga lahan tersebut saat ini tidak bisa kami olah lagi,” keluh Yoseph Fallo dibenarkan warga lainnya. Anton Fallo menambahkan, setelah digusur pada Oktober 2012 lalu, masyarakat sempat diberikan bantuan bibit padi jenis Inpari 13 untuk setiap anggota sebanyak delapan kilogram

untuk ditanami. Namun karena tidak adanya saluran irigasi dan curah hujan yang cukup minim pada saat itu sehingga padi kemudian kering dan mati sebelum menghasilkan buah. Selanjutnya untuk tahun 2013 dan 2014, katanya, masyarakat tidak mendapatkan bantuan bibit padi ataupun jagung untuk ditanami di lahan seluas 21 hektar tersebut oleh 93 pemilik lahan. Padahal sebelumnya masyarakat sudah berinisiatif menanam jagung dengan bibit sendiri, namun dilarang oleh pemerintah karena katanya akan diberikan bantuan bibit jagung. Namun kemudian tidak diberikan sehingga sampai saat ini seluruh lahan pertanian tersebut tidak diolah masyarakat petani.

6. NELAYAN PRODUKSI RUMPUT LAUT GULUNG TIKAR

Pos Kupang: Kamis, 27 Maret 2014 (halaman 18)

Penangkapan ikan menggunakan racun potas mulai menghancurkan masa depan nelayan di daerah kepulauan seperti yang dirasakan nelayan di Desa Kojagete, Kojadoi dan Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Nelayan yang memproduksi rumput laut di daerah kepulauan itu kini mulai mengeluh karena hasil produksi rumput laut yang dulunya sebulan 300 ton kini tinggal mimpi belaka. Rumput laut warga di daerah pesisir tidak ada satu pun yang berhasil. Kades Kojadoi, Hanawi, menyebut modus nelayan menggunakan potas saat menangkap ikan, yakni potas dicampur dengan ikan halus lalu nelayan pura-pura memancing di laut lalu potas disiram. Setelah itu, nelayan tinggal menunggu ikan mati terapung lalu ditarik ke dalam perahu. “Dinas teknis harus buat kapal patroli dan ada petugas serta polisi di daerah kepulauan. Kalau ada pengawasan setiap hari pasti tidak ada potas dan bom ikan di daerah kepulauan,” papar Hanawi.

7. MASYARAKAT TTU KECEWA TAK DAPAT BENIH JAGUNG

Pos Kupang: Kamis, 20 Maret 2014 (halaman 3)

Sebagian masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), khususnya di Kecamatan Noemuti, kecewa dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTT karena tidak mendapat benih jagung untuk ditanami pada lahan seluas 700 hektar. Menurut anggota DPRD NTT daerah pemilihan TTU dan Belu, Anton Timo temuan itu telah dimasukkan dalam laporan kunjungan kerja untuk disampaikan secara resmi kepada pimpinan dan gubernur NTT. Data yang diperoleh menyebutkan, lahan seluas 700 hektar itu tersebar di 11 desa dan kelurahan, yakni Oeparigi, Seo, Noebaun, Bijeli, Nifu Boke, Fatumuti, Kiuola, Noemuti, Banfanu, Oenak dan Popnam. Ada 45 kelompok tani dengan anggota mencapai 1000 orang ini yang memiliki luas lahan antara 15-20 hektar. Benih jagung yang dijanjikan adalah varietas jagung lamuru dengan jadwal tanam Oktober 2013. Temuan lainnya, ada kelompok tani penerima bantuan pengembangan ubi kayu, kacang tanah dan kacang hijau dari dana APBD I NTT tahun 2013 tapi tidak ada benih yang diberikan. “Untuk kacang tanah tidak ada benih, hanya pupuk yang dibagikan. Antara

lain di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana ada lahan 10 hektar dari kelompok KWT Mawar jumlah 25 orang, Desa Manunain A ada 10 hektar untuk 25 orang anggota kelompok dan Desa Tapenpah, lahan 10 hektar dari Kelompok Bilu Bahan beranggotakan 36 orang,” beber Anton.

8. HARGA BERAS MERANGKAK NAIK

Victory News: Jumat, 28 Maret 2014 (halaman 11)

Harga beras di Pasar Matawai, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sejak Januari hingga saat ini mulai merangkak naik. Sebelumnya dijual Rp 7.500 per kilogram, saat ini mencapai Rp 9.000 per kilogram. Naiknya harga beras disinyalir karena ancaman gagal panen. Warga Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kota Waingapu, Domu Radja kepada VN, Kamis (27/3) mengatakan, bulan Januari harga beras masih Rp 7.500 per kilogram namun dua bulan terakhir ini sudah mencapai Rp 9.000 hingga Rp 15.000 per kilogram. Dia mengkhawatirkan, jika tidak ada intervensi dari pemerintah, harga beras di Kota Waingapu akan terus merangkak naik dan akhirnya menyusahkan masyarakat. Salah satu penjual beras di Pasar Matawai, Yuliana Ngongo mengakui adanya kenaikan harga beras. Menurut dia, beras RI 64 sebelumnya dijual Rp 7.500 saat ini menjadi Rp 8.000 per kilogram. Sementara beras medium dari harga Rp 8.500 menjadi Rp 9.000 per kilogram dan beras pulut putih dari harga Rp 9.500 menjadi Rp 12.000 per kilogram serta beras pulut hitam dari harga Rp 10.000 naik menjadi Rp 15.000 per kilogram. “Kita jual harga-harga ini mulai dari Januari, karena kita beli di orang dan grosir juga mahal. Paling kalau kita hitung keuntungan hanya Rp 500 atau Rp 1.000 per kilogram. Kalau beras Bulog selama ini tidak dijual,” ujarnya. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Sumba Timur Umbu Maramba mengatakan, Pemkab Sumba Timur sudah menggelar rapat dan memutuskan untuk melakukan operasi pasar.

9. TANAM JAGUNG MENJANJIKAN

Pos Kupang: Minggu, 16 Maret 2014 (halaman 6)

Kepala Divisi Pengembangan PT Pramana Agrerisources, Wayan Dita, mengatakan, usaha menanam jagung sangat menjanjikan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan menanam jagung, rakyat dapat mengkonsumsinya, menjadi stok pakan ternak dan selebihnya dijual dengan harga relatif mahal. Saat ini harga jagung berkisar Rp 3.300/kg. Wayan pun mengajak rakyat Sumba Tengah menggelorakan semangat menanam jagung demi mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. “Lahan yang luas hendaknya dimanfaatkan untuk usaha tanaman jagung ketimbang dibiarkan begitu saja. Kendala utama yang dihadapi adalah etos kerja masyarakat Sumba Tengah tergolong masih rendah,” ujar Wayan sebelum panen raya jagung di Lia Nyale, Desa Tanah Modu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Kamis (13/3). Wayan mengaku awalnya sangat susah mengajak masyarakat sekitar bergabung dengan PT

Pramana mengolah lahan untuk mengembangkan tanaman jagung. Masyarakat pesimis kalau niat menanam jagung dapat memberikan hasil baik. Namun seiring perjalanan waktu, katanya, sejak tahun 2012 melakukan kegiatan penanaman jagung di Sumba Tengah, perlahan-lahan beberapa warga sekitar menjadi tenaga kerja usahanya. Misalnya menjadi tenaga operator peralatan pertanian. Wayan menjelaskan, sesuai izin, diperoleh lahan sekitar 140 hektar. Dari luas lahan tersebut baru sekitar 70 hektar telah dikembangkan untuk menanam jagung. "Hasilnya cukup baik, rata-rata satu hektar menghasilkan 2-5 ton," ujarnya. Tahun ini, kata Wayan, pihaknya menanam jagung hibrida seluas 70 ha. Pada tahap pertama memanen 25 ha. Hasilnya dijual ke Jawa. Wayan menambahkan, selain mengembangkan usaha tanaman jagung hibrida, pihaknya juga mengembangkan ternak babi di wilayah itu. Usaha ternak babi selain untuk memenuhi kebutuhan lokal, juga diekspor ke luar negeri.

RISK

1. RUMAH AMBROS TERTIMBUN LONGSOR

Pos Kupang: Jumat, 21 Maret 2014 (halaman 19)

Rumah Ambros Demo, warga Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Rabu (19/3) tertimbun tanah longsor yang mengakibatkan rumah beserta isinya terkubur dibalik reruntuhan tanah berlumpur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu hanya semua isi rusak serta hilang. Kepada Pos Kupang di lokasi kejadian, Ambros menuturkan bahwa kejadian longsor yang menimpa rumahnya sekitar pukul 08.00 Wita. Saat itu di dalam rumah ada 8 orang penghuni. "Sebelum terjadi longsor saya melihat ada tanda-tanda seperti rembesan air yang cukup deras dari balik rumah diikuti bunyi seperti tanah terbelah. Melihat kondisi demikian maka saya lantas meminta semua penghuni rumah untuk keluar. Baru beberapa menit berada di luar rumah, tanah yang ada di belakang rumah langsung runtuh menimpa," kata Ambros. Pasca kerusakan rumah, Ambros mengaku dia dan keluarganya kini hanya berharap pada tetangga untuk menampung mereka sementara waktu sambil menunggu proses perbaikan atas rumahnya.

2. PANTAI JADI TEMPAT SAMPAH

Pos Kupang: Rabu, 19 maret 2014 (halaman 15)

"Masyarakat Kota Kupang sebenarnya mau hidup bersih, tetapi untuk melakukan aksi menciptakan kebersihan mereka malas. Lihat saja di wilayah pesisir pantai, masih dijadikan tempat sampah oleh warga." Hal ini dikatakan Otnial, warga Nunbaun Dela

saat diskusi pengembangan sanitasi dasar lingkungan dan kearifan lokal masyarakat pesisir kota di Aula Kantor Lurah Fatubesi, Selasa (18/3). “Di wilayah Pantai Nunbaun Dela sering dijadikan tempat untuk membuang sampah. Kalau ada banjir, semua sampah menumpuk di pesisir pantai. Mulai dari sampah plastik, pakaian bekas, sampah pembalut wanita dapat kita jumpai di pesisir pantai. Ini menunjukkan kalau kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah,” ujarnya. Hal yang sama dikeluhkan oleh Susan, warga Oesapa. “Di pesisir pantai itu ada tulisan di pohon, larangan membuang sampah di pesisir pantai. Tetapi kalau sudah malam, tetap saja warga membuang sampah di pesisir pantai makanya Pantai Oesapa tetap kotor. Selokan di wilayah pesisir juga tidak jelas karena muaranya tidak sampai ke laut. Hanya tertampung di dalam saluran saja makanya bau busuk ada dimana-mana,” ujarnya. Salah satu pemateri, Prof. Gufran Dirawan, mengatakan, penanganan masalah sampah di kota tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah tetapi harus ada peran aktif dari masyarakat. “Saya pernah bertanya kepada Dinas PU Kota Kupang tentang anggaran penangan sanitasi lingkungan di Kota Kupang. Dia menjawab bahwa satu tahun disediakan Rp 100 juta. Jelas ini tidak akan cukup. Itu hanya untuk buat selokan beberapa ratus meter langsung dananya habis,” katanya. Ia mengatakan, selama ini belum adanya sinkronisasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanggulangan sampah. Hal inilah yang menjadikan sampah sulit diatasi. “Sikap apatis masyarakat selama ini yang menjadi kendala dalam penanggulangan sampah di Kota Kupang. Jika saja pemerintah dapat mengatasi hal ini saya rasa masalah sampah di Kota Kupang dapat diselesaikan,” ujar Gufran.

3. JALAN PERBATASAN DIKERJAKAN ASAL JADI

Timor Express: Sabtu, 22 Maret 2014 (halaman 13)

Kejaksaaan Negeri (Kejari) Kefamenanu mendatangkan tim ahli dari Poltek Kupang untuk melakukan uji hasil kerja rintisan jalan baru Inbate-Buk-Napan Kabupaten TTU yang merupakan proyek Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten TTU. Kepala Kejari Kefamenanu, Dedie Tri Haryadi yang diwawancarai Timor Express melalui Kasi Pidsus, Frangky M. Radja mengaku, saat dilakukan uji lapangan terhadap rintisan jalan baru tersebut, ternyata sudah hancur lebur. Selain hancur karena digerus air, jalan tersebut sudah tidak dilintasi kendaraan lagi. “Hasil uji lapangan yang sudah dilakukan tim dari Poltek itu masih dalam tahap perhitungan. Panitia serta kontraktor saat ditanyakan tentang gambar awal rintisan jalan baru tersebut mengaku tidak ada sama sekali. Permintaan gambar awal lokasi sangat perlu sehingga bisa disesuaikan kondisi sebelumnya dan juga kondisi setelah rintisan jalan tersebut dikerjakan,” kata Franky. Akibat tidak dibangunnya *box kalver*, maka beberapa titik jalan air putus tergerus air.

4. LONGSOR, TRANSPORTASI LUMPUH 15 JAM

Timor Express: Senin, 24 Maret 2014 (halaman 15)

Puluhan kendaraan terperangkap longsor dan harus bermalam di km 18 – km 19 jalan jurusan Ende-Maumere. Longsoran terjadi akibat hujan lebat selama dua hari berturut-turut. Sekira 50 meter material tanah dan batu tepatnya di km 18 runtuh dan menutup badan jalan, Rabu (19/3). Kendaraan yang hendak menuju Kota Ende atau sebaliknya menuju arah timur Maumere harus terhenti. Salah seorang sopir travel, Agustinus Agu mengatakan “Saya dengar runtuhnya pada jam 18.00. Saya sampai di situ satu jam kemudian, terpaksa saya bersama penumpang harus bermalam di kendaraan sampai pagi”. Agustinus menambahkan, berdasarkan informasi, teknisi alat berat tidak berani karena kondisi gelap, sehingga mereka harus menunggu sampai pagi. Dia menegaskan, praktis sekitar 15 jam mereka harus menunggu supaya bisa melewati longsoran yang penuh dengan tanah dan bebatuan besar itu. Sementara itu, Kepala Balai Jalan dan Jembatan Flores, Leo Sigit mengatakan, longsoran akan terus terjadi di lokasi tersebut jika terjadi hujan yang cukup intens. Dia menuturkan, membutuhkan tiga tahun baru bisa dikatakan normal untuk lokasi km 17 - km 19. “Kalau sudah mendapat kemiringan yang aman baru bisa tidak terjadi lagi longsoran. Namun untuk itu kita butuh waktu hingga tahun depan,” kata Leo Sigit.

5. ENAM KALI GOTONG-ROYONG, LIMA KALI TERBAWA BANJIR

Timor Express: Kamis, 27 Maret 2014 (halaman 1)

Selasa (11/3), warga Desa Bipolo yang tergabung dalam Perkumpulan Pemakai Air (P3A) bergotong royong membangun bendungan darurat untuk keenam kalinya karena selalu menjadi langganan banjir. Ketika ditemui, mereka bergotong royong di sungai Lulia yang menjadi sumber kehidupannya. Sekitar 500 hektare sawah para petani mendapat air dari sungai ini. Ada yang memotong daun pohon gewang di hutan, ada yang menanam kayu seukuran lengan orang dewasa ke dalam sungai. Di sisi lain, ada yang mengikat daun pohon gewang ke batang kayu yang ditanam di sungai dan masih banyak pekerjaan lainnya. Semuanya dilakukan secara gotong royong dan sukacita. Aktifitas ini dipimpin Ketua P3A Manekan Bipolo, Marthen Luther Abani. Sekitar seratus meter lebih bendungan darurat dibuat guna mengalirkan air dari sungai Lulia ke sawah mereka. Hal ini karena bendungan induk yakni bendungan Lulia yang diberi nama sesuai nama sungai di Desa Bipolo ini rusak diterjang banjir sejak 2010 silam. Bahkan mereka pernah membendung sungai Lulia ini menggunakan 1500 karung pasir. Namun ketika hujan dan banjir, seluruh karung itupun hanyut terbawa. Bersama 20 anggota P3A Manekan, Marthen mengaku mencoba memanfaatkan apa yang mereka miliki tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah. Terbukti, memasuki tahun keempat mereka bekerja secara swadaya membangun bendungan. “Baru setahun dibangun sayap bagian barat bendungan sudah patah kena banjir. Tahun itu juga (2010) direhab tapi bantalannya patah sehingga air tidak masuk ke sawah,” jelasnya. Ketua DPRD

Kabupaten Kupang, Octori Gasperzs dan anggota dewan lainnya yakni Agus Tanau, Otnial Bobsuni sudah turun lihat kerusakan bendungan tetapi sama saja.

6. KAPAL CARGO TERSANGKUT DI UJUNG LANDASAN PACU BANDARA

Timor Express: Kamis, 20 Maret 2014 (halaman 1)

Hujan deras disertai angin kencang, Rabu (19/3) dini hari menyebabkan gelombang di pantai Ipi dan Ende mencapai tiga hingga empat meter. Sebuah kapal cargo, KM Araya terseret arus hingga tersangkut bibir landasan pacu Bandara Haji Hasan Aroeboesman. Kejadian ini mengundang perhatian ratusan warga kota Ende yang terus berdatangan menyaksikan karamnya kapal cargo itu. Kerasnya gelombang menghantam dinding kapal sehingga terjadi benturan antara tebing pembatas bandara yang terletak di ujung runway dengan badan kapal. Berdasarkan pengakuan beberapa warga di lokasi, kapal naas itu terseret gelombang pada Rabu dini hari. Kondisi ini cukup mempengaruhi aktifitas di bandara itu, sehingga jika tidak segera diatasi maka akan mengganggu penerbangan dari dan menuju Ende.

7. IRIGASI WAE DINGIN DAN WAE DANGI MUBAZIR

Timor Express: Kamis, 20 Maret 2014 (halaman 15)

Lima tahun lamanya, bangunan irigasi Wae Dingin dan Wae Dangi yang berlokasi di Kampung Purang Mese Desa Compang Ndejing Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur (Matim) belum pernah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Proyek APBN ini dikerjakan tahun 2006 dan sejak selesai kerja tahun 2007, hingga sekarang bangunan tersebut tidak pernah dialiri air alias mubazir. Yang lebih anehnya kata warga, Pemerintah Kabupaten Matim telah membangun proyek percontohan sawah di wilayah itu tahun 2010, tapi tidak mempertimbangkan sumber air yang nantinya bisa mengairi areal persawahan. Selain itu, pemerintah telah bentuk tenaga operasional dan pemeliharaan khusus untuk Irigasi Wae Dingin dan Dangi, tapi rutinitasnya sebatas membersihkan saluran irigasi yang sama sekali sudah lama tidak dialiri air. Kepala Desa Compang Ndejing, Silvester Nanggur yang ditemui Timor Express membenarkan, bantuan saluran irigasi menuju wilayah Purang Mese tidak pernah berfungsi. "Proyek ini sudah lama selesai dikerjakan dan sudah bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya, tapi aliran airnya tidak sampai ke wilayah Purang Mese. Ini mungkin karena debit airnya kurang. Saat ini di hulunya terjadi kerusakan berat bangunan akibat longsor, sehingga bangunan irigasi ini belum bisa dialiri air," ujarnya.

8. CUACA BURUK PELAYARAN KUPANG-ROTE LUMPUH

Victory News: Kamis, 20 Maret 2014 (halaman 10)

PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Kupang, NTT, Rabu (19/3) menghentikan operasional kapal akibat cuaca buruk. Cuaca buruk melanda Pulau Timor hingga Pulau Rote sejak Selasa (18/3) malam dan diramalkan masih berlangsung sampai Kamis (20/3). Kondisi tersebut dipicu tekanan rendah yang terbentuk di perairan Laut Timor antara wilayah NTT dan Timor Leste. Tekanan rendah memicu kecepatan angin antara 20-30 kilometer per jam serta tinggi gelombang antara empat dan lima meter di Laut Sawu, perairan selatan Kupang hingga Rote dan Laut Timor. "Kami sudahantisipasi cuaca buruk ini dengan tidak mengoperasikan kapal," kata supervisor ASDP Kupang Hermin Welkis. Sementara itu Kepala Stasiun klimatologi Lasiana Kupang July Setianto mengatakan, tekanan udara di pusat tekanan rendah tersebut mencapai 1.005 hector pascal (hpa). "Tekanan rendah ini akan hilang dengan sendirinya pada Kamis (20/3), tetapi akan muncul lagi tekanan rendah di wilayah Nusa Tenggara Barat," kata July.

9. BANJIR HANCURKAN BENDUNGAN OEHANI

Victory News: Kamis, 20 Maret 2014 (halaman 11)

Akibat hujan deras yang turun selama sepekan di wilayah Kabupaten Kupang, khususnya di Kecamatan Amfoang Utara, membawa bencana banjir. Bendungan Oehani di Desa Kolabe, Kecamatan Amfoang Utara hancur terbawa banjir. Kepala Desa Kolabe Abe Nompetus kepada VN, Rabu (19/3) di Oelamasi mengaku meski tidak ada korban jiwa, namun hujan selama sepekan di wilayah Amfoang Utara membawa petaka bagi para petani karena Bendungan Oehani yang mengairi areal persawahan Oehani hancur terbawa banjir. Kerusakan Bendungan Oehani, kata dia, membuat lahan persawahan seluas 54 hektare terancam gagal panen. Pasalnya, saluran irigasi dari bendungan ke areal persawahan yang digarap sekitar 300 petani penggarap dari empat desa yaitu Kolabe, Fatumaus, Naikliu, dan Lilmus rusak terbawa banjir. Pemkab Kupang melalui BPBD diharapkan dapat memperbaiki kerusakan sehingga sawah yang telah ditanami padi dapat diairi kembali. "Perlu ada dinding dan bronjong di Sungai Oehani, agar ketika sungai meluap tidak mengikis bibir sungai yang mengakibatkan longsor," ucapnya. Selain areal sawah Oehani, jelas dia, areal persawahan Oelkaka seluas 32 hektare pun terancam gagal panen. Areal sawah yang digarap sekitar 72 petani penggarap pun tidak dapat diairi akibat kerusakan Bendungan Oehani.

10. DUA RUMAH AMBRUK TERTIMPA LONGSOR

Victory News: Kamis, 20 Maret 2014 (halaman 13)

Dua rumah di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ambruk akibat hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kota Ende dan sekitarnya, Rabu (19/3) dini hari. Ambros Demu, salah seorang yang rumahnya ambruk total akibat ditutup longsor sehingga praktis tidak bisa ditempati lagi. "Ketika lagi hujan-

hujan, saya firasat tidak enak. Karena itu saya dan keluarga langsung mengungsi ke rumah tetangga. Tidak lama berselang, tembok penyokong yang berbatasan dengan rumah langsung ambruk,” ujarnya. Dia menambahkan, dirinya bersama keluarganya tidak sempat mengambil barang-barang berharga dalam rumah. “Semua isi rumah kami tidak sempat kami selamatkan. Hanya pakaian di badan saja,” ujarnya. Ambros berharap, Pemerintah Kabupaten Ende melalui instansi terkait untuk segera memperhatikan nasib mereka karena rumah mereka tidak bisa ditempati lagi.

11. JALAN SUMBU KUANFATU-KELE NYARIS PUTUS

Timor Express: Sabtu, 29 Maret 2014 (halaman 13)

Masyarakat Desa Kuanfatu dan Desa Kele Kecamatan Kuanfatu saat ini mengalami kesulitan beraktivitas. Bagaimana tidak, jalan sumbu yang menghubungkan dua desa tersebut saat ini nyaris putus akibat longsor. Meski kondisi tersebut sudah dikeluhkan kepada Pemkab TTS melalui musrenbang tingkat desa dan kecamatan sejak dua tahun lalu, namun hingga saat ini belum mendapat perhatian. Roy Babys, salah satu warga ketika ditemui di lokasi longsor tepatnya di RT 07/ RW 02 Dusun 2 Kecamatan Kuanfatu, Jumat (28/3) menuturkan, rusaknya jalan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dua desa. Namun masyarakat Desa Basmuti dan desa lainnya juga mengalami hal serupa karena masyarakat Desa Basmuti sering melintasi jalan tersebut saat beraktivitas. “Saya berharap dalam waktu dekat Pemkab dapat memperbaiki jalan ini, karena kalau putus masyarakat sudah tidak bisa ke pasar dan sebagainya,” harap Roy.

WATER

1. RP 20 M UNTUK AIR BERSIH DI MABAR

Pos Kupang: Kamis, 27 Maret 2014 (halaman 22)

Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Manggarai Barat tahun ini mengalokasikan dana Rp 20 miliar lebih untuk kegiatan fisik proyek air bersih di daerah itu. dari jumlah tersebut, RP 3 miliar untuk peningkatan jaringan air bersih di Kota Labuan bajo, sedangkan sisanya tersebar di 10 kecamatan. “Untuk air minum bersih dan jaringannya, total anggaran untuk kegiatan fisik tahun anggaran 2014 senilai Rp 20.083.117.000. Dari jumlah tersebut, untuk jaringan air bersih di Kota Labuan Bajo Rp 3 Miliar. Sisanya tersebar di 10 kecamatan,” kata Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setda Mabar, Salvador Pinto, Rabu (26/3). Sampai saat ini warga Kota Labuan Bajo masih kesulitan mendapatkan air bersih. Di wilayah Wae Mata, pasokan air dari PDAM selalu tersendat-sendat. Demikian juga di beberapa titik lainnya. Wilayah yang pasokan airnya relatif

lebih lancar adalah daerah Kaper. Pendistribusian air ke rumah-rumah warga atau dari pipa induk ke pipa tersier dalam proyek penyulingan air bersih Wae Mese juga belum tuntas. Beberapa titik yang sudah dilayani hanya Gorontalo, Kampung Ujung dan Golo Koe. Tapi masih ada sejumlah warga di tiga lokasi itu yang belum mendapat pasokan air bersih dari proyek itu. Khusus Gorontalo dan Kampung Ujung, suplai air bersih dari Wae Mese langsung dari pipa induk ke pipa tersier. Sedangkan di Golo Koe ada reservoir atau bak penampungnya. Pinto juga mengatakan, secara keseluruhan jumlah proyek fisik terbanyak di Jabar tahun 2014 ada di Dinas PU Jabar dengan total anggaran Rp 124.671.169.989. Rinciannya, untuk jalan Rp 79.960.231.989, irigasi Rp 24.627.821.000 dan untuk air minum bersih dan jaringannya Rp 20.083.117.000.

2. DISTRIBUSI AIR BERSIH DILAKUKAN BERGILIRAN

Victory News: Selasa, 18 Maret 2014 (halaman 7)

Direktur PDAM Kota Kupang Noldy Mumu mengaku saat ini sistem distribusi air bersih kepada pelanggan dilakukan secara bergiliran. Pasalnya, jumlah pelanggan lebih besar dari debit air yang diproduksi. Demikian dikatakan Noldy, kepada VN, Jumat (14/3). dia menjelaskan, soal permintaan penyambungan baru oleh warga Kota Kupang, PDAM tidak bisa menolak dan belum bisa melayani sambungan. Peningkatan jumlah sambungan memang diperlukan, tetapi karena debit air yang diproduksi masih tak sebanding jumlah pelanggan maka diterapkan sistem distribusi air secara bergilir. Noldy menambahkan, khusus untuk distribusi air bagi warga Kelurahan Oeleta Penkase dilakukan dua minggu sekali. "Dengan semakin meningkatnya pelanggan maka pendistribusian air tidak seperti dulu lagi, karena disesuaikan dengan debit air yang ada," ujar Noldy. Dijelaskan Noldy, sumber air baku yang dikelola PDAM Kota Kupang ada 17 sumber air yang terdiri dari 14 sumur bor, dan tiga sumber air permukaan untuk melayani pelanggan. Sementara sumber air baku yang dikelola PDAM Kabupaten Kupang, terdiri dari satu sumur bor, sembilan sumber air permukaan dan air curah BLUD SPAM NTT sebanyak satu unit, sehingga total kapasitas produksi 650 liter per detik. Untuk mencapai pemenuhan pelayanan air bersih bagi warga Kota Kupang maka masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp 30 miliar. Ditambahkan Noldy, jumlah sambungan rumah (SR) untuk PDAM Kota Kupang sebanyak 5.500 SR sedangkan PDAM Kabupaten Kupang sebanyak 29.000 SR, sehingga total cakupan layanan yakni 57,00 persen. Waty Bagang warga Kelurahan Oeleta Penkase mengaku pelayanan air PDAM Kota Kupang bagi pelanggan belum maksimal karena distribusi air bersih tidak lancar. "Sebagai pelanggan PDAM Kota Kupang dalam seminggu air hanya mengalir satu kali padahal kami selalu dikenakan biaya beban yang cukup besar yakni RP 20.000 per bulan," ujar Waty.

Tentang Penerbit

Penerbitan NTT Research Focus adalah bagian dari pengembangan NTT Studies oleh IRGSC, sebuah think tank yang berbasis di Kupang, NTT.

Koordinator pelaksana : Inriyani Takesan
Penanggung Jawab : Dominggus Elcid Li, PhD
Editor : Dr. Jonatan A. Lassa
Asisten pelaksana : Oktaviana Djulete, Nike Frans, Randy Banunaek
Reviewer : John Talan